

KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MEMPERJUANGKAN ASPIRASI MASYARAKAT

LISA KURNIA, SARMIATI, ERNITA ARIF

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas
penulis_lisa@unand.ac.id

Abstract: *Members of the DPRD of West Sumatra Province have a moral responsibility to fight for the aspirations of the community. In fighting for the aspirations of the community, political communication is needed ideally to give a better influence on the community. In fighting for the aspirations of the community, it is necessary for the members of the council to have good political communication skills. This study aims to analyze the experience of political communication of members of the DPRD of West Sumatra Province in fighting for aspirations in their constituency and to analyze the essential meaning of the experience of political communication of DPRD members in fighting for the aspirations of the people in their constituency. The research method used is a qualitative phenomenological approach with a constructivist paradigm. With data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. The results of the research obtained are that the communication that occurs is dialogical which allows anyone, from politicians, activists, and partners to become communicators and communicants at almost the same time. The aspirations conveyed by the community are the main messages in political communication that occur throughout the struggle for the aspirations of the people by members of the DPRD of West Sumatra. Mass communication, interpersonal communication, and organizational communication are communication channels used throughout the agenda for the struggle for community aspirations by members of the DPRD of West Sumatra Province. The obstacles encountered in fighting for the aspirations of the community are the existence of changing regulations, and the need for synchronization of regulations from the central government, city district governments, and provincial governments related to the authority of the aspirations submitted and synchronization with the work programs of relevant agencies and the RPJMD, with a long period of 1 year. making it difficult to fight for urgent aspirations.*

Keywords: *Communication, Politic, DPRD, Aspirations.*

A. Pendahuluan

Komunikasi dan demokrasi adalah dua hal yang senantiasa dibicarakan beriringan di tengah masyarakat. Hal ini berdasarkan pada suatu asumsi bahwa komunikasi yang baik adalah tolok ukur kemajuan demokrasi di Indonesia. Sementara demokrasi yang baik ditunjukkan oleh keadaan komunikasi yang baik pula. Di samping itu deteminasi antara komunikasi dan demokrasi di Indonesia juga diyakini adanya oleh Gutama (2012). Keberadaan komunikasi di dalam sistem besar demokrasi bagi pemerintahan Indonesia menjadi penting sebagai sarana awal untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat (Arumsari et al., 2020). Semua permasalahan mesti diselesaikan dengan dialog. Semua permasalahan juga memiliki potensi untuk menjadi konflik yang lebih besar. Indonesia secara nasional sebenarnya mempunyai suatu mekanisme demokrasi yang telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Mekanisme ini idealnya berbentuk dialog antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan masyarakat luas. Hanya saja dewasa ini tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan baik.

Permasalahan yang muncul tidak hanya berskala nasional saja. Ada juga skala kedaerahan. Masalah di daerah juga mesti diselesaikan secara kedaerahan juga, itu lah alasan kenapa anggota DPR juga dipilih di daerah, biasanya disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mekanisme dan sistem yang ada di DPRD persis sama dengan yang ada di DPR secara nasional. Demi menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat melalui demokrasi, ilmu komunikasi secara teknis mempunyai kajian yang lebih spesifik tentang ini. Inilah yang disebut dengan kajian komunikasi politik.

Komunikasi politik merupakan sebuah proses penyampaian pesan yang bermuatan politik dan dilakukan oleh aktor politik berkaitan dengan kekuasaan (Nimmo, 2014:8). Dalam buku *Komunikasi Politik (Konsep, Teori, dan Strategi)* karangan Cangara (2016), definisi komunikasi politik lebih ditekankan pada simbol-simbol atau pesan yang disampaikan dalam komunikasi politik secara signifikan dibentuk atau memiliki konsekuensi terhadap sistem politik.

Komunikasi politik menurut Cangara (2011) ialah suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Meadow dalam Nimmo (2014) mengartikan bahwa "*Political communication refers to any exchange of symbols or messages that to a significant extent have been shaped by or have consequences for political system*". Di sini, Meadow memberi tekanan bahwa simbol-simbol atau pesan yang disampaikan itu secara signifikan dibentuk atau memiliki konsekuensi terhadap sistem politik, tetapi Nimmo sendiri yang mengutip Meadow dalam bukunya hanya memberi tekanan pada pengaturan umat manusia yang dilakukan di bawah kondisi konflik. Komunikasi politik sebagai *body of knowledge* terdiri atas berbagai unsur, yakni sumber (komunikator), pesan, media atau saluran, penerima, dan efek (Cangara, 2016). Sejalan dengan beberapa pakar di atas, Rakhmat (2005) memberikan klasifikasi dalam kajian komunikasi politik. Secara kompleks sebenarnya juga sudah diklasifikasikan oleh Rakhmat (2005), mulai dari komunikator, pesan, media, khalayak dan efek. Tetapi pada penelitian ini, klasifikasi tentang komunikator mesti lebih ditinjau lebih dalam. Ia memberikan mengelompokkan komunikator politik berasal dari Politisi dan aktivis.

Politikus menurut Rakhmat (2005: 30-31) adalah orang yang memiliki cita-cita untuk menjadi pemimpin yang dapat menentukan kebijakan, bisa dikatakan juga sebagai pejabat dan/atau calon pejabat. Politikus ini tidak tertutup kemungkinan berasal dari sektor legislatif, yudikatif, atau eksekutif. Para politikus ini senantiasa mencari pengaruh melalui komunikasi. Nimmo (2005: 37) juga menjelaskan bahwa aktivis itu salah satunya berasal dari pemuka pendapat. Aktivis ini bisa berasal dari siapa saja, lapisan masyarakat mana saja, bahkan juga dapat berasal dari organisasi. Lebih lanjut lagi, pemuka pendapat menyampaikan informasi dan gagasan. Dalam konteks penelitian ini, informasi dan gagasan yang disampaikan tidak mesti bermuatan politik, tetapi boleh saja bermuatan kritik, keluhan, saran, dan hal lainnya. Melalui pandangan Nimmo (2005) di atas, pada penelitian ini, politikus dan aktivis dapat diasosiasikan menjadi anggota DPRD Sumatera barat dan Masyarakat yang berasal dari masing-masing daerah pemilihannya. Keduanya merupakan komunikator politik sepanjang masa reses. Itu artinya, tidak ada diantara mereka yang tidak mendapatkan pengalaman komunikasi sepanjang masa reses terjadi.

Saluran komunikasi politik juga beragam. Setidaknya Nimmo (2005: 166-167) menjelaskan tiga tipe saluran komunikasi politik, yakni; komunikasi massa, komunikasi interpersonal, dan komunikasi organisasi. Ketiga saluran tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula. Komunikasi massa mengharuskan komunikator memiliki kemampuan khusus untuk berhadapan dengan masyarakat banyak. Komunikasi interpersonal mengharuskan komunikator memiliki kemampuan komunikasi untuk memberikan pengaruh. Dan, komunikasi organisasi mengharuskan komunikator memiliki kemampuan komunikasi yang runut, rinci, dan koordinatif. Ketiga bentuk saluran itu juga memberikan pengalaman yang berbeda kepada anggota DPRD Sumatera Barat sepanjang masa reses. Komunikasi politik memiliki peranan penting bagi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sebagai wakil rakyat dan dipilih oleh rakyat, dipilih berdasarkan daerah pemilihan, mereka harus turun ke masyarakat untuk menjemput, memperjuangkan aspirasi masyarakat, serta memberi pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap aspirasi masyarakat yang diamanahkan. Dalam rangka menjemput aspirasi masyarakat tersebut, anggota DPRD melaksanakan kegiatan reses ke daerah pemilihannya masing-masing.

Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pada Pasal 324 disebutkan bahwa kewajiban anggota DPRD antara lain: (i) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; (j) menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; (k)

memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Penjelasan pasal 324 bahwa pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya. Sebagai wujud pertanggungjawaban secara moral tersebut anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat harus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diamanatkan kepadanya. Sepanjang perjuangan ini, Anggota DPRD tentu saja dituntut untuk bias mendengarkan dengan baik apa yang diinginkan oleh masyarakat yang kemudian diperjuangkan secara politik pada agenda lain, pada perjuangan ini komunikasi adalah titik utamanya. Untuk itu, perlu komunikasi politik dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut.

Adanya rangkaian dan mekanisme yang panjang dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, mengharuskan anggota DPRD memiliki kemampuan komunikasi yang lebih. Meski dengan kemampuan komunikasi yang baik, tetapi pengalaman komunikasi yang didapatkan belum tentu juga baik dan ramah perasaan. Inilah asumsi utama yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Pengalaman komunikasi yang didapat sepanjang kegiatan reses tentu saja berbeda pada tiap-tiap anggota DPRD, apalagi hal ini berkaitan dengan daerah pemilihannya. Kondisi, kebutuhan, keinginan, dan masalah masyarakat yang berbeda pada tiap-tiap daerah pemilihan memberikan pengalaman komunikasi yang berbeda pula bagi anggota DPRD. Bahkan tidak menutup kemungkinan anggota DPRD juga mendapatkan pengalaman komunikasi yang unik. Penolakan, tingkah lucu, gelagat yang aneh, perdebatan diantara masyarakat, ancaman, sanjungan yang berlebihan, hingga sikap apatis masyarakat mungkin saja menjadi pengalaman unik bagi anggota DPRD. Inilah yang menjadikan penelitian ini menarik untuk dilakukan.

Pengalaman tersebut diungkap secara ilmiah pada penelitian ini. Untuk mengungkap dan menganalisis pengalaman ini, peneliti akan menggunakan pendekatan fenomenologi. Dalam konteks fenomenologi, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah aktor yang melakukan tindakan sosial dalam melakukan komunikasi politik dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Agar penulisan ini terarah, konsep yang dapat digunakan dalam penelitian ini perlu sebagai acuan dari analisis permasalahan yang akan diteliti. Sebelumnya telah banyak penelitian-penelitian mengenai pola komunikasi politik anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakatnya.

Pertama Mazid & Hadji (2019) meneliti Model Komunikasi Politik Anggota DPRD dalam Upaya Penguasaan Civic Skills Masyarakat. Aspek-aspek yang dilihat dalam penelitian ini adalah membahas model komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Magelang dalam upaya penguasaan keterampilan kewarganegaraan (civic skills) masyarakat di Kabupaten Magelang dan menguraikan tahapan komunikasi politik anggota DPRD sebagai upaya penguasaan keterampilan kewarganegaraan (civic skills) masyarakat di Kabupaten Magelang. Hasil penelitian menunjukkan pada model komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Magelang sebagai upaya penguasaan keterampilan kewarganegaraan (civic skills) masyarakat di Kabupaten Magelang adalah melalui komunikasi langsung dan tidak langsung. Kedua, tahapan komunikasi politik anggota DPRD berlangsung sebagai upaya penguasaan keterampilan kewarganegaraan (civic skills) masyarakat di Kabupaten Magelang dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Penelitian yang dilakukan Mazid & Hadji (2019) melihat model komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota DPRD. Penelitian ini menguraikan aspek komunikasi politik penguasaan keterampilan kewarganegaraan anggota DPRD melalui komunikasi langsung dan tidak langsung dan dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Penelitian yang telah dilakukan memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti komunikasi politik namun memiliki perbedaan, yaitu penelitian terdahulu mengkaji penguasaan Civic Skills masyarakat sementara peneliti mengkaji komunikasi politik anggota DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakatnya.

Kedua, Saeni (2020) yang mengamati Pengalaman Komunikasi Politik DPRD DKI Jakarta terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kontroversi gaya komunikasi Ahok yang 'blak-blakan'. Ada yang suka dan tidak suka dengan gaya komunikasi serupa itu, bahkan suka-tidak suka ini juga sering

dilontarkan oleh beberapa anggota DPRD DKI Jakarta. Pengalaman komunikasi politik anggota DPRD dengan Gubernur DKI Jakarta menjadi fokus penelitian ini yang dikaji menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa memang ada yang menyukai gaya komunikasi ahok serupa itu, tetapi tidak lebih banyak dari pada anggota DPRD yang tidak menyukai gaya komunikasi serupa itu. Selain itu, penelitian ini juga mengelompokkan setidaknya sembilan tema yang sering dibicarakan ahok melalui penuturan subjek.

Ketiga, Lutfi (2016) yang meneliti mengenai Pola Komunikasi Politik Anggota DPRD Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Tahun 2013 di Kecamatan Pontianak Timur. Aspek-aspek yang dilihat dalam penelitian ini adalah membahas pola komunikasi partai politik, peranan DPRD Kecamatan Pontianak Timur dalam menyalurkan aspirasi masyarakatnya sebagai actor yang memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk program kerja atau kegiatan pembangunan oleh anggota DPRD Kecamatan Pontianak Timur. Hasil penelitian didapatkan, fenomena sosial yang ada anggota DPRD sangat berperan sebagai komunikator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, peran anggota DPRD di sini sebagai komunikator misalnya dalam proses pembentukan opini publik untuk membuat beberapa gagasan, yang awalnya ditolak, kemudian dipertimbangkan dan akhirnya diterima. Upaya yang dilakukan Anggota DPRD dalam melakukan penyerapan aspirasi masyarakat, seperti kegiatan dalam hal menjangkau aspirasi rakyat, mengetahui perkembangan yang terjadi maupun menemukan skala prioritas kegiatan pembangunan ke depan, Anggota DPRD Kecamatan Pontianak Timur mengadakan reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Adapun faktor yang dapat memengaruhi Fraksi dalam menyerap aspirasi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan, diantaranya adalah masalah waktu reses, di mana masa reses anggota DPRD masih dirasakan singkat, jadwal kegiatan anggota DPRD reses biasanya berbenturan dengan acara-acara yang mendadak yang harus dihadiri sehingga waktu resesnya terganggu, kemudian masalah dana terbatas, karena dalam kunjungan reses kelapangan memang sudah dibatasi dalam perencanaan anggaran sehingga tidak menutup kemungkinan waktu untuk reses kelapangan kurang.

Pola komunikasi politik dalam penelitian yang dilakukan Lutfi (2016), menganalisis komunikasi Anggota DPRD Pontianak Timur dengan menyerap Aspirasi Masyarakat. Kegiatan yang dilakukan yaitu berupa program kerja atau kegiatan pembangunan oleh anggota DPRD. Hal yang memengaruhi yaitu dalam waktu reses yang singkat dan jadwal yang sering bersamaan sehingga masa reses yang dilakukan memiliki waktu yang kurang. Penelitian ini memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama melihat komunikasi politik anggota DPR dalam menyerap aspirasi masyarakat. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan karena objek penelitian memiliki perbedaan, penelitian sebelumnya di Pontianak Timur dan penelitian akan dilakukan di Sumatera Barat.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas disampaikan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dan bersifat kebaruan daripada penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada beberapa hal. Ada yang meneliti tentang pengalaman komunikasi anggota DPRD tetapi tidak pada masa reses, sementara pada masa reses ini Anggota DPRD diasumsikan akan mengalami berbagai macam komunikasi politik. Ada juga yang meneliti pada masa reses, sementara hanya melihat kepada pola komunikasi. Ada juga yang melihat secara luas model komunikasi politik anggota DPRD, sayangnya tidak melihat lebih dalam bagaimana keadaan komunikasi yang dialami pada berbagai peristiwa komunikasi yang ada. Melalui perbedaan-perbedaan tersebut, penelitian ini mencoba untuk melakukan yang lebih baik dengan melihat pengalaman komunikasi politik pada masa reses dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif - fenomenologi dengan paradigma konstruktivisme. Subjek penelitian sebanyak 9 (sembilan) orang yang akan digali menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di wilayah administratif Sumatera Barat. Data dianalisis menggunakan teknik analisis data

fenomenologi dari Edmund Husserl, dengan cara melakukan reduksi epoche, eidetik, dan transendence. Dalam penelitian ini, uji validitas data akan dilakukan dengan “refleksivitas” (*reflexivity*) peneliti. Maksud *reflexivity* adalah merefleksikan pemikirannya dengan menggunakan variasi imajinatif (*imaginative variation*) atau deskripsi struktural (*structural description*) dan mencari keseluruhan makna yang memungkinkan dan melalui perspektif yang divergen (*divergent perspectives*), mempertimbangkan kerangka rujukan atas gejala (*phenomenon*), dan mengkonstruksikan bagaimana gejala tersebut dialami. (Hamid, 2008).

C. Hasil dan Pembahasan

Pengalaman Komunikasi Politik Anggota DPRD dalam Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat di Daerah Pemilihannya.

Pengalaman komunikasi yang dialami oleh masing-masing subjek tentunya berbeda-beda. Meskipun begitu, pertanyaan wawancara yang muncul adalah sama. Semua subjek mendapatkan pertanyaan yang sama pada sesi wawancara bersama peneliti. Begitu juga dengan para Subjek yang memberikan jawaban, mereka sama-sama memberikan jawaban terkait pertanyaan yang sudah disusun. Dalam artian, tidak ada satu pun subjek yang menyatakan ketidaksiannya dalam menjawab pertanyaan penelitian. Secara umum, pada penelitian ini para subjek menuturkan pengalamannya dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi. Mulai dari tahapan serua apa yang mesti mereka lalui sepanjang menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Lalu dengan siapa saja mereka berkomunikasi, bagaimana keterlibatan orang-orang tersebut. Kemudian saluran apa yang mereka gunakan. Begitu juga pesan-pesan apa yang muncul sepanjang mereka menyerap dan memperjuangkan aspirasi, termasuk pesan-pesan serupa apa yang mereka terima dari masyarakat dan koleganya. Hingga hambatan dan lobi politik serupa apa yang mereka alami ketika berhadapan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan idealnya.

Pada pembahasan ini, apa yang disampaikan oleh subjek terkait pengalaman komunikasi mereka dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi dapat dianalisis menggunakan teknik reduksi epoche dalam bentuk transkrip wawancara yang disalin ulang. Kemudian transkrip tersebut diinterpretasikan lebih lanjut menggunakan reduksi eidetik. Terakhir barulah dilakukan pengelompokan sesuai dengan beberapa pandangan yang muncul terkait dengan menyerap dan memperjuangkan aspirasi. Pada tahap ini setidaknya ada 4 (empat) poin penting yang berkaitan dengan pengalaman komunikasi yang mereka alami sepanjang menyerap dan memperjuangkan aspirasi, yaitu; tahapan yang mereka lalui, Komunikan-komunikator yang terlibat, saluran yang digunakan, dan hambatan-lobi politik yang mereka alami. Setelah dilakukan analisis data, setidaknya peneliti dapat menjelaskan dan mendeskripsikan pengalaman komunikasi para subjek sesuai dengan paparan teori yang ada. Pengalaman komunikasi yang dialami oleh para subjek tidak terlepas dari komunikator-komunikan, atau siapa saja orang-orang yang berpartisipasi dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi.

Setelah itu dapat juga kita telaah lebih jauh sesuatu yang berkaitan dengan pesan-pesan politik. pada penelitian ini, pesan-pesan politik yang ada tidak terlepas dari aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Pesan-pesan itu lah yang kemudian diikutsertakan pada setiap komunikasi yang dilakukan oleh para subjek. Saluran juga dapat ditelaah lebih jauh pada pembahasan ini. Setidaknya penelitian ini dapat mendeskripsikan saluran apa yang digunakan oleh para subjek dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi. Lebih lanjut lagi saluran-saluran yang berkaitan dengan lobi politik juga dapat di telaah lebih jauh pada penelitian ini. Terakhir analisis yang sama juga dilakukan untuk menelaah hambatan komunikasi apa saja yang dialami oleh para subjek. Begitu juga dengan cara mereka menghadapi hambatan tersebut juga dianalisis pada penelitian ini. Hambatan komunikasi yang terjadi berkaitan dengan lobi politik, dimana lobi politik menjadi salah satu cara para subjek menghadapi hambatan komunikasi yang mereka alami sepanjang menyerap dan memperjuangkan aspirasi.

Komunikator dan Komunikan. Komunikasi politik menyebut komunikator dan komunikan itu dengan istilah politisi dan aktivis (Rakhmat, 2005: 30-31). Sementara pada penelitian ini istilah politisi dan aktivis belum dapat mewakili fenomena yang ada. Sehingga

perlu juga diasosiasikan kepada istilah komunikator dan komunikan dalam istilah ilmu komunikasi yang sesungguhnya. Politisi dapat diartikan sebagai orang yang memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan (Rakhmat, 2005: 30-31). Sedangkan aktivis dijelaskan oleh Nimmo (2005: 37) sebagai pemuka pendapat. Aktivis dapat berasal dari perseorangan dan/atau kelompok. Penelitian ini menemukan bahwa eksistensi subjek sebagai komunikator dan komunikan tidaklah tetap. Meskipun subjek berprofesi sebagai seorang politisi, tetapi pada kenyataan sepanjang memperjuangkan aspirasi masyarakat subjek tidak selalu menjadi komunikator. Ada kalanya ia menjadi komunikan. Begitu juga dengan aktivis, pemuka pendapat tidak selalu menjadi komunikator, ada juga kalanya ia menjadi komunikan yang harus mendengarkan. Berikut tabel terkait komunikator dan komunikan pada berbagai tahapan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Tabel Komunikator-komunikan pada tahapan reses

N O	Subjek	Komunikator-Komunikan		
		Komunikator	Dialogis	Komunikan
1	F.Hidayat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Rafdinal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Zarfi Deson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Nurnas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Rahmat Saleh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Yunisra Syahiran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Mesra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Sitti Izati Azis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Muzli M. Nur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tabel Komunikator-komunikan pada tahap persiapan reses

N O	Subjek	Komunikator-komunikan		
		Komunikator	Dialogis	Komunikan
1	G.Hidayat	£	£	<input type="checkbox"/>
2	Rafdinal	£	£	<input type="checkbox"/>
3	Zarfi Deson	£	£	<input type="checkbox"/>
4	Nurnas	£	£	<input type="checkbox"/>
5	Rahmat Saleh	£	£	<input type="checkbox"/>
6	Yunisra Syahiran	£	£	<input type="checkbox"/>
7	Mesra	£	£	<input type="checkbox"/>
8	Sitti Izati Azis	£	£	<input type="checkbox"/>
9	Muzli M. Nur			

Tabel Komunikator-komunikan pada tahap perencanaan dan penganggaran (Lobi Politik)

N O	Subjek	Komunikator-komunikan		
		Komunikator	Dialogis	Komunikan
1	H.Hidayat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	£
2	Rafdinal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	£
3	Zarfi Deson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	£
4	Nurnas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	£
5	Rahmat Saleh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	£
6	Yunisra Syahiran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	£
7	Mesra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	£
8	Sitti Izati Azis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	£
9	Muzli M. Nur			

Dari temuan tersebut, dapat dipastikan bahwa komunikasi politik yang terjadi dapat beralur dua arah atau bahkan berjangkauan. Pada hakikatnya ketika masa reses, subjek yang notabenehnya merupakan seorang politisi akan eksis sebagai komunikan. Sementara masyarakat luas yang kemudian dapat disebut sebagai aktivis eksis menjadi komunikator. Penelurusan

yang lebih jauh menemukan bahwa reses bukanlah suatu pertemuan yang komunikasinya satu arah. Sepanjang masa reses, komunikasi terjadi dalam banyak arah. Hal ini dimulai dari subjek yang merencanakan reses eksis sebagai komunikator. Subjek membangun dialog dengan pejabat yang berwenang dalam menyiapkan reses. Orang-orang tersebut adalah pemerintahan nagari, kecamatan, dan kabupaten/kota. Pada perencanaan ini, komunikator dan komunikan juga berpindah-pindah. Ada saatnya subjek menjadi komunikator, ada juga saatnya menjadi komunikan. Begitu juga sebaliknya, ada saatnya pemerintahan tersebut menjadi komunikator, ada juga saatnya menjadi komunikan. Hal itu membuktikan bahwa komunikasi yang terbangun muncul dalam bentuk dialog.

DPRD memasuki masa reses. Reses yang terjadi di Sumatera Barat dihadiri oleh banyak orang. Setidaknya ada subjek sebagai anggota DPRD, walinagari/lurah, camat, KAN, BPN, dan masyarakat luas. Dari beberapa orang yang hadir tersebut dapat dikelompokkan kepada dua bentuk komunikator politik. Subjek sebagai politisi, sementara orang-orang yang bukan subjek merupakan aktivis. Jalannya Reses sebenarnya sudah diatur oleh Undang-undang. Reses diawali dengan pembukaan yang dibuka oleh pemerintahan yang tertinggi ketika itu, camat misalnya. Ketika itu juga camat menjadi komunikator politik. Ia terklasifikasi sebagai politisi. Hal ini terjadi karena pada saat ini hanya camat lah yang memiliki kewenangan dan kebijakan untuk membuka pertemuan. Sedangkan subjek hanya menjadi komunikator. Setelah kegiatan reses dibuka, barulah terjadi dialog antara subjek dan masyarakat. Ketika itu juga, eksistensi komunikator dan komunikan tersamarkan karena dialog yang terjadi. Sepanjang reses yang melibatkan banyak pihak tersebut terjadi interaksi yang membuat siapa saja bisa menjadi komunikator setelah beberapa saat ia menjadi komunikan. Sementara itu, negosiasi tidak terjadi karena subjek hanya mendengarkan dan menyerap aspirasi saja.

Setelah masa reses, Semua subjek memilah aspirasi mana yang akan dijadikan sebagai pokok pikiran (pokir). Pokir sudah ditentukan, barulah subjek mengusulkan itu sebagai program pemerintah. Inilah proses panjang yang dilalui oleh Subjek. Pada saat ini juga berbagai dialog muncul. Itu artinya, ada kemungkinan bahwa subjek dapat menjadi komunikan dan komunikator pada saat yang hampir bersamaan. Ada juga bentuk lain dalam menyerap aspirasi yang dilakukan oleh semua subjek. Bentuk tersebut biasanya dilakukan secara spontan. Artinya siapa saja dapat menyampaikan aspirasi kepada subjek. Ketika setiap orang yang menyampaikan aspirasi tersebut eksis sebagai komunikator, sementara komunikannya adalah para subjek. Setiap orang yang dimaksud di sini adalah setiap orang yang berasal dari daerah pemilihan masing-masing subjek.

Sebagian Subjek menentukan skala prioritas terhadap orang-orang yang dalam menyerap aspirasi. Itu artinya sebagian subjek membatasi aktivis yang akan menjadi komunikator ketika mereka menyerap aspirasi masyarakat. Prioritasnya berbeda-beda, tergantung pengalaman subjek di lapangan. Semua subjek yang menempatkan skala prioritas ini juga meyakini bahwa skala prioritas itu penting dibuat agar mereka tidak tumpang tindih dengan anggota dewan yang lain. Perjuangan aspirasi di mulai dari sini. Pokok pikiran yang diajukan dibahas dulu secara dialog bersama fraksi dan/atau komisi. Ketika mengusulkan aspirasi untuk diwujudkan, subjek eksis sebagai komunikator. Dan orang-orang yang berada dalam fraksi dan/atau komisi eksis sebagai komunikan. Setelah aspirasi itu diterima juga oleh anggota fraksi dan/atau komisi, barulah dialog terjadi. Ada interaksi dan negosiasi. Interaksi yang terjadi pada dialog antara para subjek dengan fraksi dan/atau komisi biasanya muncul karena beberapa pertanyaan terkait, apakah aspirasi tersebut memang kebutuhan masyarakat, bagaimana dengan anggaran, pejabat dan/atau OPD mana yang berwenang untuk merealisasikan aspirasi tersebut. Setelah pembicaraan tersebut tuntas, barulah subjek menjadi komunikator atas aspirasinya di rapat paripurna.

Rapat paripurna adalah forum tertinggi di DPRD. Rapat ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD. Pada rapat ini, aspirasi yang diperjuangkan oleh masing-masing subjek mesti dipresentasikan kepada seluruh anggota dewan yang menghadiri rapat paripurna tersebut. Pada saat ini, para subjek lagi-lagi eksis sebagai komunikator. Setelah para subjek mempresentasikan aspirasinya masing-masing, barulah dibawa ke rapat komisi dan rapat kerja. Disini lah awal mula dialog terjadi. Biasanya pada rapat paripurna ini jelas mana aspirasi yang

tidak dapat diwujudkan dan mana aspirasi yang dapat diwujudkan. Aspirasi yang tidak dapat diwujudkan adalah masalah bagi para subjek. Sehingga ia harus mengusulkan lagi pada saat sidang paripurna berikutnya. Sepanjang rentang waktu menuju ke rapat paripurna selanjutnya tersebut, para subjek melakukan lobi politik. Lobi politik adalah suatu hal yang pasti dilakukan oleh subjek ketika aspirasi yang telah diajukan oleh masyarakat pemilihnya ditolak oleh forum.

Lobi politik juga berbentuk dialogis yang interaktif. Orang-orang yang terlibat dalam lobi politik disebut sebagai mitra. Awalnya eksistensi para subjek adalah komunikator. Setelah itu, ia dapat berubah menjadi komunikan. Orang-orang yang terlibat dalam dialog ini adalah Subjek itu sendiri dengan OPD dan Dinas terkait. OPD dan Dinas terkait juga mengalami hal sama dengan subjek. Mereka juga dapat menjadi komunikator dan komunika dalam satu waktu yang hampir bersamaan. Lobi politik juga tidak selalu membuahkan hasil yang baik. Ada lobi politik yang berbuah manis, dibuktikan dengan dukungan mitra dan persetujuan mitra terhadap aspirasi yang sedang diperjuangkan. Ada juga yang aspirasi tersebut ditolak. Jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya banyak penyebab yang membuat aspirasi ditolak. Tetapi kegagalan dalam memperjuangkan aspirasi tersebut mesti disampaikan lagi ke masyarakat. Tujuan agar masyarakat tidak berharap terlalu lama, lalu kecewa pada akhirnya. Dengan begitu pada masa reses berikutnya, masyarakat dapat memikirkan ulang aspirasi lain yang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya.

Sebenarnya, komunikasi antara subjek dengan masyarakat yang berada di daerah pemilihannya tidak hanya sekadar pada masa reses dan ketika aspirasinya ditolak saja. Para subjek juga senantiasa membangun komunikasi dengan masyarakat. Pada saat ini para subjek mutlak menjadi komunikator. Mereka hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat mutlak menjadi komunikan. Pada tahap ini, subjek memiliki perbedaan dalam menyampaikan informasi yang mereka bawa, perbedaan tersebut terletak pada pesan dan saluran yang digunakan. Bicara komunikator dan komunikan adalah bicara tentang partisipasi. Artinya siapa saja yang terlibat dalam memperjuangkan aspirasi. Secara sederhana, orang yang terlibat sangatlah banyak. Namun di sisi lain, partisipasi yang ada harus difokuskan kepada masyarakat karena memperjuangkan aspirasi merupakan upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat lebih baik.

Menurut Sherry Arnstein, partisipasi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 8 bagian. Mulai dari keterlibatan yang paling kecil (Manipulation) hingga keterlibatan tertinggi (Citizen Control). Lalu pada penelitian ini, komunikan-komunikator yang ada senantiasa berpartisipasi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Masyarakat dapat menjadi komunikator, sekaligus komunikan. Dalam hal ini jika dilihat lebih jauh ini adalah bentuk dari Citizen Control. Itu artinya masyarakat dapat terlibat langsung dalam menentukan arah kebijakan setelah mereka menyampaikan aspirasinya pada reses yang dilakukan oleh anggota dewan. Hanya saja pada beberapa kesempatan, reses yang dilakukan oleh anggota dewan tidak berjalan lancar. Masyarakat yang diharapkan untuk menjadi komunikator utama justru tidak menyampaikan aspirasinya pada saat reses tersebut. Bahkan pada saat kegiatan reses yang dilakukan secara resmi masyarakat lebih cenderung menjadi komunikan saja. Kebanyakan hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Anggota dewan sebagai aktor politik. Ini adalah suatu ketidaksadaran masyarakat bahwa pada hakikatnya masyarakat juga merupakan aktor politik yang dapat menentukan arah kebijakan.

Keadaan seperti itu dapat terjadi berulang-ulang. Tapi uniknya setelah kegiatan reses yang dilakukan secara itu, masyarakat cenderung mampu menyampaikan aspirasinya kepada anggota dewan. Mereka bahkan terlihat menguasai materi aspirasi yang disampaikannya. Inilah yang kemudian menjadi awal mulai partisipasi masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan. Sehingga keterlibatan masyarakat pada saat reses yang dilakukan oleh para subjek dapat diklasifikasikan sebagai bentuk Citizen Control.

Pesan-pesan politik. Pesan politik adalah pesan yang disampaikan oleh aktor politik untuk memengaruhi orang lain secara politis (Nimmo, 2014). Jika dilihat lebih jauh, penelitian menemukan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat merupakan pesan utama dalam komunikasi politik yang terjadi sepanjang memperjuangkan aspirasi masyarakat oleh anggota dewan. Aspirasi masyarakat berisi informasi-informasi terkait perubahan serupa apa yang

diinginkan oleh masyarakat. Pesan politik ditemukan pada penelitian ini adalah aspirasi. Aspirasi memang pada awalnya merupakan pesan yang disusun oleh masyarakat. Namun pada akhirnya, sepanjang proses perjuangan aspirasi, aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat bisa juga menjadi pesan politik yang dibawa oleh anggota dewan untuk disampaikan kepada mitranya. Tidak hanya sampai di situ, aspirasi yang sudah disampaikan oleh masyarakat seolah menjadi tema tersendiri pada peristiwa komunikasi politik.

Aspirasi masyarakat adalah pesan utama. Meski begitu, aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak begitu saja tercipta. Ada proses untuk sampai kepada aspirasi dapat dikatakan sebagai pesan politik. Proses tersebut terjadi di tengah-tengah masyarakat, sementara itu para subjek hanya menerima aspirasi sebagai pesan politik yang disampaikan oleh masyarakat sebagai aktor politik. Lebih lanjut lagi, aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat juga memuat isi yang berbeda-beda pula. Biasanya tergantung dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kadang-kadang para subjek penelitian juga menemukan isi aspirasi yang terbilang aneh. Tidak jarang juga isi dari aspirasi tidak sesuai dengan kewenangan DPRD provinsi. Sehingga para subjek diharuskan melakukan observasi terlebih dahulu untuk dapat menentukan aspirasi mana yang akan diperjuangkan.

Masyarakat memang beragam, sehingga semua subjek menganggap bahwa ketidakjelasan pesan yang muncul tersebut adalah suatu kewajiban yang harus dimaklumi. Tetapi kewajiban tersebut tidak harus juga dibiarkan begitu saja demi mencerdaskan dan mempercepat terwujudnya aspirasi masyarakat. Para subjek dituntut untuk menyampaikan juga pesan politik yang berisi informasi terkait wewenang DPRD Provinsi. Selain informasi, anggota dewan juga dituntut untuk mampu mengajak masyarakat secara partisipatif mencari tahu mana kewajiban dan kewenangan DPRD provinsi, setelah itu baru mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Penelitian juga menemukan dan merumuskan bahwasanya ada skala aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Ada aspirasi yang berskala individu, kelompok, dan masyarakat. Aspirasi dengan skala masyarakat yang lebih luas cenderung dapat diperjuangkan sesuai dengan wewenang anggota DPRD Provinsi. Melalui penuturan para subjek, ciri-ciri aspirasi yang dapat diperjuangkan adalah sebagai berikut; a) Aspirasi tersebut berasal dari dan untuk masyarakat; b) Memiliki impact yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan; c) Berasal dari sektor pendidikan, kesehatan, pertanian dan ekonomi produktif, serta infrastruktur; dan d) Sesuai dengan kewenangan DPRD Provinsi.

Ciri-ciri aspirasi tersebut merupakan pesan politik yang berasal dari masyarakat. Artinya pesan-pesan yang memuat informasi keempat ciri tersebut adalah pesan politik yang disampaikan oleh masyarakat selaku komunikator politik. Ketika aspirasi masyarakat sesuai dengan empat ciri tersebut, para subjek dapat menjadikan aspirasi tersebut sebagai pokir dan tentunya akan diperjuangkan di DPRD. Pesan dalam bentuk aspirasi sudah disampaikan oleh masyarakat kepada para Subjek. Selanjutnya para subjek membawa pesan tersebut ke parlemen untuk diperjuangkan pada tingkat yang lebih tinggi. Itu artinya hampir setiap komunikasi politik yang terjadi, pesannya memuat aspirasi masyarakat. Meski begitu, sebenarnya ada pesan yang lain yang dibawa oleh subjek dalam memperjuangkan aspirasi tersebut. Aspirasi adalah pesan utama yang disampaikan oleh masyarakat kepada anggota dewan. Tetapi pesan yang disampaikan oleh anggota dewan pada berbagai komunikasi politik tidak hanya aspirasi dari masyarakat saja. Semua subjek menyusun pesan baru sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pesan tersebut berupa alasan-alasan kenapa aspirasi tersebut harus diwujudkan, atau bisa dikatakan juga sebagai esensi dan urgensi aspirasi tersebut. Dari pemaparan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis pesan yang disampaikan oleh masyarakat dalam bentuk partisipasi adalah pesan informatif. Sementara itu jenis pesan yang disampaikan oleh Subjek adalah pesan informatif dan persuasif.

Saluran. Nimmo (2005: 166-167) mengklasifikasikan tiga tipe saluran komunikasi politik, yakni; Komunikasi massa, komunikasi interpersonal, dan komunikasi organisasi. Pada komunikasi politik yang dilakukan oleh subjek dalam memperjuangkan aspirasi masyarakatnya, juga menggunakan saluran tersebut. Penggunaan saluran komunikasi juga dapat terjadi secara bersamaan. Ada saatnya menggunakan dua atau bahkan tiga saluran pada

suatu kegiatan yang dilakukan oleh anggota dewan. Sementara pada beberapa kegiatan hanya menggunakan satu saluran komunikasi saja. Hal itu bergantung kepada partisipan komunikasi yang terlibat dalam komunikasi politik tersebut. Temuan tersebut akan dibahas lebih lanjut pada sub-bab ini.

Berikut adalah tabel tentang pemanfaatan media oleh Subjek sepanjang menyerap hingga memperjuangkan aspirasi. Tabel berikut terbagi ke dalam tiga tahapan memperjuangkan aspirasi yang akan dimuat pada masing-masing tabel;

Tabel Saluran Komunikasi Pada Tahapan Reses.

N O	Subjek	Saluran Komunikasi Politik		
		Komunikasi Massa	Komunikasi Interpersonal	Komunikasi Organisasi
1	I.Hidayat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Rafdinal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Zarfi Deson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Nurnas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Rahmat Saleh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Yunisra Syahiran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Mesra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Sitti Izati Azis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Muzli M. Nur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tabel Saluran Komunikasi Pada Tahapan Persiapan Reses

N O	Subjek	Saluran Komunikasi Politik		
		Komunikasi Massa	Komunikasi Interpersonal	Komunikasi Organisasi
1	Non Subjek (DPRD Sumbar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tabel Saluran Komunikasi Pada Tahapan Perencanaan-Penganggaran (Lobi Politik)

N O	Subjek	Saluran Komunikasi Politik		
		Komunikasi Massa	Komunikasi Interpersonal	Komunikasi Organisasi
1	H. Hidayat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Rafdinal	£	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Zarfi Deson	£	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Nurnas	£	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Rahmat Saleh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Yunisra Syahiran	£	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Mesra	£	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Sitti Izati Azis	£	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Muzli M. Nur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Memperjuangkan aspirasi dimulai dengan menyerap aspirasi. Menyerap aspirasi ada aturan perundang-undangannya. Tentu saja pemahaman anggota dewan berbeda terhadap itu. Untuk menyelaraskan pemahaman tersebut anggota dewan dibekali dengan berbagai pelatihan. Pelatihan ini dilakukan menggunakan saluran komunikasi interpersonal. Sedangkan untuk menginformasikan pelatihan tersebut, DPRD menggunakan ketiga saluran yang ada. Informasi pelatihan dapat diterima oleh para subjek secara organisasi, tentunya ini merupakan saluran komunikasi organisasi. Pada saluran ini hierarki organisasi sangat berlaku, pimpinan DPRD yang turun langsung untuk melakukan komunikasi kepada para anggotanya. Tentu saja pimpinan DPRD tidak memiliki waktu dan kesempatan yang banyak untuk menyampaikan informasi pelatihan tersebut, sehingga pimpinan membentuk tim secara organisasi yang ditugaskan untuk menyebarkan informasi tersebut. Tim ini juga yang akan mengurus urusan informasi DPRD pada berbagai kegiatan lain.

Tim yang dibentuk oleh pimpinan DPRD tersebut ditugaskan untuk menyebarluaskan informasi terkait pelatihan. Pada bagian, saluran komunikasi yang digunakan bertambah. Para subjek pernah menerima surat yang diberikan oleh tim tersebut. Pernah juga disampaikan melalui WhatsApp, baik secara pribadi maupun grup. Pernah juga disampaikan melalui media lain seperti di papan pengumuman. Semua hal tersebut adalah saluran komunikasi massa, artinya saluran tersebut dapat menyentuh massa sebagai komunikannya. Tim tersebut juga menggunakan saluran komunikasi interpersonal, biasanya dilakukan secara tatap muka. Komunikasi serupa ini dapat terjadi ketika rapat. Para subjek tidak jarang juga menerima informasi dari pimpinan atau teman-teman dewan lain melalui rapat yang sedang terjadi.

Setelah Subjek dengan dibekali dengan pemahaman terkait dengan aturan perundang-undangan tentang penyerapan aspirasi. Barulah subjek terjun ke masyarakat untuk menjemput aspirasi tersebut. Pada saat menjemput aspirasi ini, para subjek terlihat menggunakan saluran yang berbeda. Ada yang memanfaatkan ketiga saluran, ada juga yang tidak memanfaatkan semua saluran yang ada. Setelah semua aspirasi diserap melalui berbagai saluran komunikasi, aspirasi tersebut akan diperjuangkan secara politis di DPRD. Perjuangan tersebut hendaknya disampaikan dan dikawal oleh masyarakat. Untuk itu, saluran komunikasi dibutuhkan agar masyarakat dan subjek dapat terus terhubung. Semua saluran komunikasi politik yang ada dimanfaatkan demi kepentingan ini. Mulai dari saluran interpersonal, saluran komunikasi massa, dan organisasi.

Para subjek memulainya dengan melakukan komunikasi organisasi pada tingkat DPRD. Persetujuan, penolakan, dan lobi-lobi politik muncul pada saluran ini. Persetujuan yang dimaksud di sini adalah aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dapat dimuat dalam rancangan APBD tahun berikutnya, dan akan terealisasi segera. Sementara penolakan dan lobi politik terlihat saling beriringan. Ketika aspirasi yang sedang diperjuangkan oleh subjek ditolak oleh forum, maka lobi politik berlaku ketika. Tujuan untuk mengubah keputusan penolakan aspirasi menjadi persetujuan terhadap aspirasi yang diperjuangkan. Ketika saluran komunikasi organisasi tidak dapat menuntaskan perjuangan aspirasi yang dilakukan oleh Subjek, barulah subjek membangun lobi politik ke pihak lain dengan menggunakan saluran yang lain lagi. Saluran komunikasi interpersonal dan saluran komunikasi massa digunakan, tanpa meninggalkan saluran komunikasi organisasi. Para subjek tidak bisa begitu saja meninggalkan saluran komunikasi organisasi, karena secara politik hanya pada saluran itu aspirasi masyarakat dapat diwujudkan.

Lobi politik cenderung dilakukan menggunakan saluran komunikasi interpersonal. Hal ini dilakukan karena masing-masing subjek memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam melancarkan komunikasinya. Sementara itu saluran komunikasi massa dijadikan sebagai penguat penggunaan saluran interpersonal. Pesan-pesan yang disampaikan dalam saluran komunikasi massa dapat berasal dari berbagai media, baik itu media cetak, elektronik, maupun digital. Media-media tersebut yang membantu subjek menguatkan lobi politiknya. Begitu juga dengan media sosial yang menjadi bagian dari saluran komunikasi massa. Sepanjang lobi-lobi politik, kekuatan dan kekuasaan dipertaruhkan. Subjek dengan kekuatan dan kekuasaan yang lebih tinggi akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengubah penolakan menjadi persetujuan. Kekuatan dan kekuasaan tersebut biasanya didukung oleh citra yang melekat pada masing-masing subjek. Sementara itu, citra yang melekat pada diri para subjek dapat dilihat melalui media sosialnya masing-masing. Sehingga pantas dikatakan bahwa lobi politik membutuhkan saluran komunikasi massa untuk menguatkan subjek.

Bagaimana pun keadaannya aspirasi yang sudah menjadi pokir akan diperjuangkan oleh masing-masing subjek. Penolakan dan persetujuan adalah hal biasa, tetapi penolakan aspirasi tidak dapat dimaklumi begitu saja. Anggota dewan mesti memperjuangkan itu lebih maksimal lagi. Dalam perjuangan itu, para subjek juga tidak melupakan masyarakat yang menyampaikan aspirasi tersebut. Untuk itu masyarakat perlu diberi tahu sudah sejauh mana aspirasi yang disampainya. Dalam hal ini, para subjek melakukan komunikasi lagi dengan masyarakat. Saluran yang digunakan dalam menyampaikan sejauh mana perkembangan aspirasi yang disampaikan masyarakat adalah saluran komunikasi interpersonal dan saluran komunikasi massa. Penggunaan saluran komunikasi interpersonal dapat dilakukan dengan menghubungi

langsung masyarakat terkait. Sementara komunikasi massa digunakan sebagai upaya untuk menyebarkan ke masyarakat luas bahwa perjuangan aspirasi sudah sampai pada tahap tertentu. Begitu juga dengan aspirasi yang diserap secara terlembaga dari berbagai SKPD. Mereka tetap akan terhubung dengan para subjek selama perjuangan aspirasinya belum tuntas. Meskipun pada penyerapan aspirasi terjadi kerja sama organisasi antara subjek dan pejabat tersebut, tetapi pada tahap ini komunikasi hanya dilakukan menggunakan saluran interpersonal dan komunikasi massa. Tidak menggunakan saluran komunikasi organisasi lagi.

Hambatan Komunikasi. Hambatan komunikasi secara umum disebabkan oleh gangguan yang menyebabkan komunikasi itu tidak berjalan lancar. Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan gangguan tersebut yaitu, faktor manusia (human) dan non manusia (non-human). Selama menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berada di daerah pemilihannya, para subjek pasti ada mengalami hambatan komunikasi. Pada pembahasan ini akan dilakukan pengklasifikasian hambatan yang dialami oleh para subjek. Klasifikasi tersebut didasarkan pada hambatan yang berasal dari manusia dan hambatan yang berasal dari bukan manusia. Hambatan yang berasal dari manusia disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Hambatan serupa mengakibatkan masyarakat sulit memahami tugas pokok dan fungsi DPRD pada berbagai tingkatan. Selain itu, hambatan serupa membuat masyarakat kurang percaya diri dalam menyampaikan aspirasinya. Hingga akhirnya masyarakat dinilai kurang pro-aktif oleh subjek. Dengan begitu, aspirasi sulit didapat, dan proses memperjuangkan aspirasi juga sulit dilakukan.

Solusi atas permasalahan rendahnya tingkat pendidikan yang membuat penyerapan aspirasi terhambat adalah dengan meningkatkan kemampuan komunikasi politik anggota dewan. Peningkatan kemampuan komunikasi politik anggota dewan sudah berkali-kali dilakukan, bahkan anggota dewan dianggap sudah mapan dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Hanya saja misspersepsi antara masyarakat dan politisi sering juga terjadi. Hal ini disebabkan oleh kurang tepat perumusan masalah yang terjadi di lapangan. Kurang tepatnya perumusan masalah yang terjadi di lapangan dapat diakibatkan oleh masyarakat itu sendiri. Dapat juga diakibatkan oleh politisi. Masyarakat yang tidak memahami permasalahan yang tengah mereka hadapi, tetapi tetap menyampaikan aspirasi adalah awal mula hambatan serupa ini terjadi. Aspirasi yang salah memang berkemungkinan untuk dapat diwujudkan, tetapi hasil dari aspirasi tersebut mungkin saja tidak tepat sasaran. Begitu juga politisi yang tidak turun langsung ke masyarakat akan memiliki persepsi yang berbeda dengan masyarakat, sehingga aspirasi yang diperjuangkan juga tidak tepat sasaran.

Hambatan non-manusia sering terjadi pada penginputan aspirasi di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Hambatan yang terjadi biasanya diakibatkan oleh sistem tersebut mengalami error. Selain itu penggunaan yang rumit juga sering dikeluhkan oleh anggota dewan. Begitu juga dengan tampilan SIPD yang kadang-kadang bermasalah. SIPD juga tidak memberikan kesempatan untuk melakukan dialog, pada sistem ini komunikasi hanya terjadi satu arah. Sehingga aspirasi yang diinput pada sistem ini tidak dapat ditinjau ulang oleh anggota dewan. SIPD ini juga hanya diperuntukkan bagi anggota dewan saja, sehingga masyarakat tidak dapat meninjau langsung aspirasi milik mereka. Hambatan non-manusia lain juga berasal dari kendala jaringan internet dan telepon. Biasanya hal ini berpengaruh pada percepatan waktu untuk mewujudkan aspirasi. Hal ini disebabkan oleh kondisi dimana jaringan internet dan telepon sudah menjadi kebutuhan primer untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang berada di daerah. Di samping rentang waktu yang memang lama dalam mewujudkan aspirasi, kendala jaringan internet dan telepon justru menambah rentang waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan aspirasi.

Lobi Politik. Lobi politik yang dimaksud pada penelitian ini adalah komunikasi politik yang dibangun dari anggota dewan kepada pejabat pemerintah dengan kewenangan lain. Lobi politik yang dilakukan para subjek penelitian bertujuan untuk merekayasa kekuatan dan pengaruh demi mempercepat dan memperlancar proses realisasi aspirasi masyarakat. Lobi politik yang dilakukan oleh subjek adalah upaya mencari solusi terhadap hambatan yang mereka alami dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Lobi politik yang terjadi dapat dirangkum ke dalam satu kalimat, yaitu: "Lobi politik adalah upaya komunikasi yang

dilakukan oleh anggota dewan kepada pejabat berwenang lain demi mewujudkan aspirasi masyarakat.” Semua subjek menuturkan bahwa lobi politik itu mesti ada. Sasaran penerima lobi politik juga beragam, ada yang berasal dari internat DPRD, OPD dan Dinas, TNI/Polri, DPRD pusat, DPRD kabupaten/kota, bahkan kepada masyarakat itu sendiri. Pesan yang dibawa pun biasanya berisi permintaan untuk menyetujui dan membantu para subjek dalam mewujudkan aspirasi masyarakat. Para subjek juga melakukan lobi politik dengan berbagai cara dan menggunakan berbagai media.

Makna Esensial dari Pengalaman Komunikasi Politik Anggota DPRD dalam Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat di Daerah Pemilihannya.

Setelah dilakukan analisis data, peneliti menemukan bahwa setidaknya ada tiga pandangan yang berkaitan dengan menyerap aspirasi. Dan, dua pandangan tentang memperjuangkan aspirasi. Semua subjek mengemukakan pandangannya tentang reses. Begitu juga dengan pandangan terkait dengan memperjuangkan aspirasi. Semua subjek juga punya pandangan masing-masing tentang itu. Secara umum ada beberapa poin penting yang diungkapkan oleh para subjek terkait dengan makna esensial pengalaman komunikasinya. Setidaknya ada tiga poin penting yang dapat dirumuskan untuk ini. Rumusan makna esensial tersebut didapatkan setelah melakukan pembahasan dan telaah dari pandangan para subjek tentang menyerap dan memperjuangkan aspirasi.

Poin penting yang diungkapkan para subjek setidaknya dapat juga dikelompokkan menjadi tiga hal. Pertama, Perjuangan aspirasi di DPRD bertujuan untuk merangkul masyarakat agar terpilih lagi dan/atau bukti tanggung jawab setelah dipilih oleh masyarakat. Kedua, adanya kepuasan batin ketika turun menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ketiga, menyerap dan memperjuangkan aspirasi adalah upaya pembangunan bagi masyarakat. Keempat, anggota DPRD sudah bergerak memerhatikan masyarakat yang dibuktikan dengan kegiatan mereka dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Lebih lanjut terkait dengan pandangan tersebut akan dibahas di bawah ini;

Pandangan Tentang Menyerap Aspirasi. Menyerap dan memperjuangkan aspirasi adalah dua hal yang berbeda. Penyerapan aspirasi secara aturan dilakukan dalam bentuk reses. Sementara memperjuangkan aspirasi dilakukan secara terlembaga di parlemen. Kedua sama-sama dapat dianalisis menggunakan teori-teori komunikasi politik. Pandangan terhadap memperjuangkan dan menyerap aspirasi juga berbeda. Setidaknya ada 3 pandangan yang disampaikan oleh subjek-subjek terkait dengan penyerapan aspirasi. Sementara itu ada 2 pandangan yang berbeda terkait dengan memperjuangkan aspirasi. Tiga pandangan yang mengemuka dari subjek-subjek terhadap penyerapan aspirasi adalah; (1) Penyerapan aspirasi yang dilakukan dalam bentuk reses adalah kesempatan silaturahmi yang senantiasa ditunggu-tunggu dengan antusias oleh anggota dewan untuk bertemu dengan masyarakat. (2) Penyerapan aspirasi (reses) adalah suatu upaya melibatkan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan. (3) Reses adalah suatu aturan yang tersistem dan tercantum di Undang-undang sebagai kewajiban anggota dewan.

Pandangan Tentang Memperjuangkan Aspirasi. Melihat kepada pandangan subjek dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, sejatinya semua subjek sepakat bahwa dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat haruslah sesuai dengan kewenangan DPRD Provinsi. Sementara itu dua perbedaan yang mencolok terkait dengan pandangan terhadap memperjuangkan aspirasi masyarakat adalah; (1) Aspirasi masyarakat haruslah diperjuangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (2) Tidak semua aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan karena berkaitan dengan kewenangan masing-masing tingkatan dewan. Aspirasi masyarakat haruslah diperjuangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah pandangan yang berkaitan dengan efektivitas komunikasi politik. Subjek-subjek yang memiliki pandangan serupa ini mencoba untuk melakukan pembangunan yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga waktu dan tenaga dalam melakukan komunikasi politik di DPRD tidak terbuang sia-sia saja. Tidak semua aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan karena berkaitan dengan wewenang masing-masing tingkatan dewan. Ini sebenarnya adalah pandangan yang dikemukakan oleh para subjek karena mereka tidak dapat memperjuangkan semua aspirasi masyarakat. Mereka merasakan bahwa wewenang yang

sedang melekat pada DPRD adalah hambatan, padahal sebagai anggota dewan mesti memperjuangkan semua aspirasi masyarakat.

Makna Merangkul Masyarakat. Pemaknaan dari pengalaman komunikasi yang diperoleh oleh semua subjek adalah merangkul masyarakat. Memperjuangkan komunikasi secara kasat mata memang ditujukan untuk masyarakat. Tetapi tujuan dibalik itu seringkali tidak terlihat. Jika dilihat jumlah periode para subjek terlihat bahwa mereka semua merupakan orang-orang yang sudah menduduki kursi legislatif di DPRD lebih dari satu kali, itu artinya mereka sudah berulang kali menjadi anggota dewan. Bagi anggota dewan yang memang memperjuangkan aspirasi masyarakat, tentu mereka akan dapat tempat di hati masyarakat. Dengan begitu mereka dengan mudah merangkul masyarakat yang merasakan tindak-tanduk dari perjuangan yang dilakukannya. Masyarakat yang sudah dirangkul oleh anggota dewan adalah modal utama untuk melanjutkan karir legislatif mereka pada pemilihan legislator berikutnya.

Makna Kepuasan Batin. Para Subjek tentu mengalami komunikasi yang berbeda-beda. Tetapi adalah satu pengalaman yang sama-sama dirasakan oleh semua subjek, yaitu perdebatan ketika membahas anggaran untuk aspirasi masyarakat daerah pemilihannya. Pengalaman serupa ini seringkali dialami oleh anggota dewan tensi yang terbilang tinggi. Sementara itu rekayasa kekuatan dalam memanfaatkan lobi politik memang terasa sekali sepanjang membahas anggaran. Komunikasi dengan tensi yang tinggi, hambatan yang dilalui, dan lobi politik yang dilakukan adalah proses memperjuangkan aspirasi yang patut diapresiasi. Terlihat bahwa apresiasi yang muncul jarang sekali berasal dari masyarakat, tetapi anggota dewan tetap melakukan perjuangan itu. Hal ini adalah bukti bahwa kepuasan batin yang diperoleh oleh anggota dewan melebihi apresiasi yang diberikan oleh masyarakat. Ketika anggota dewan berhasil mewujudkan aspirasi masyarakatnya, ketika itu pula kepuasan batin dirasakan oleh anggota dewan tersebut.

Makna Tanggung Jawab dan Upaya Pembangunan. Memperjuangkan masyarakat adalah tanggung jawab yang tidak bisa dilepaskan dari anggota dewan. Sebagai anggota dewan yang dipilih masyarakat, tentu mereka harus mempertanggungjawabkan amanah masyarakat tersebut. Cara mereka mempertanggungjawabkan amanah masyarakat adalah dengan cara menyerap dan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat pemilihnya. Selain itu, perjuangan aspirasi juga sudah diamanatkan oleh undang-undang. Sekaligus sumpah jabatan yang mereka ucapkan ketika pertama kali dilantik. Dengan begitu, para anggota dewan dapat disebut sebagai negarawan. Jika dilihat lebih jauh, kehadiran negarawan di Indonesia memang diperuntukkan sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Pengalaman komunikasi yang dialami oleh para subjek memperlihatkan bahwa yang mereka lakukan adalah upaya pembangunan. Bagaimana tidak, perjuangan aspirasi yang akan mereka wujudkan semuanya mestilah aspirasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Dengan begitu, apa yang mereka perjuangkan tidak serta merta dapat dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat saja. Seperti halnya pembangunan yang mengedepankan kesejahteraan, para subjek juga memperjuangkan aspirasi yang akan memberikan pengaruh baik kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Makna Bergerak Memerhatikan Masyarakat. Pengalaman komunikasi yang dialami oleh anggota DPRD Sumatera Barat dalam memperjuangkan aspirasi memang panjang. Sementara ada beberapa aturan dan wewenang yang membuat tidak semua aspirasi dapat diwujudkan. Kesadaran serupa itu agaknya sudah dipahami juga oleh semua anggota dewan. Para subjek terlihat mampu melepaskan diri dari kesia-siaan yang mereka hadapi. Bagi anggota dewan perjuangan adalah gerakan yang dilakukan untuk memerhatikan masyarakat. Meskipun mereka sadar ada perjuangan yang sia-sia, tetapi mereka tetap menyerap aspirasi dari masyarakat. Walaupun ada aspirasi yang tidak dapat diwujudkan, tetapi mereka tetap memperjuangkan aspirasi tersebut. Ini adalah bukti bahwa anggota dewan memang berupaya untuk memerhatikan masyarakat yang ada di daerah pemilihannya.

D. Penutup

Komunikasi yang terjadi bersifat dialogis. Sehingga memungkinkan siapa saja, mulai dari politisi, aktivis dan mitra dapat menjadi komunikator dan komunikan pada satu waktu yang hampir bersamaan. Penelitian juga menemukan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat merupakan pesan utama dalam komunikasi politik yang terjadi sepanjang memperjuangkan aspirasi masyarakat oleh anggota dewan. Komunikasi massa, komunikasi interpersonal, dan komunikasi organisasi adalah saluran komunikasi yang digunakan sepanjang agenda perjuangan aspirasi masyarakat oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Penggunaan saluran komunikasi juga dapat terjadi secara bersamaan. Ada saatnya menggunakan dua atau bahkan tiga saluran pada suatu kegiatan yang dilakukan oleh anggota dewan. Sementara pada beberapa kegiatan hanya menggunakan satu saluran komunikasi saja. Hal itu bergantung kepada partisipan komunikasi yang terlibat dalam komunikasi politik tersebut. Kesimpulan penelitian juga menemukan bahwa terdapat Tiga pandangan yang mengemuka dari subjek-subjek terhadap penyerapan aspirasi adalah; (1) Penyerapan aspirasi yang dilakukan dalam bentuk reses adalah kesempatan yang senantiasa ditunggu-tunggu dengan antusias oleh anggota dewan untuk bertemu dengan masyarakat. (2) Penyerapan aspirasi (reses) adalah suatu upaya melibatkan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan. (3) Reses adalah suatu aturan yang tersistem dan tercantum di Undang-undang sebagai kewajiban anggota dewan. Sementara itu dua perbedaan yang mencolok terkait dengan pandangan terhadap memperjuangkan aspirasi masyarakat adalah; (1) Aspirasi masyarakat haruslah diperjuangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (2) Tidak semua aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan karena berkaitan dengan kewenangan masing-masing tingkatan dewan

Daftar Pustaka

- Arumsari, N., Paradita, W. D., & Wijayanti, T. (2020). Strategi Komunikasi dalam Upaya Penyelesaian Konflik Nelayan Pantai Utara di Kabupaten Batang. *Integralistik*, 3(1), 22–28.
- Cangara, H. (2016). *Komunikasi Politik Konsep Teori dan Strategi*. Rajawali Pers.
- Gutama, T. A. (2012). Peran Komunikasi Dalam Demokratisasi. *Forum*, 40(1), 51–56.
- Hafied, C. (2011). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Lutfi, A. (2016). Pola Komunikasi Politik Anggota Dprd Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Tahun 2013 Di Kecamatan Pontianak Timur. *Aspirasi Jurnal S1 Ilmu Politik*, 4(1), 1–18.
- Mazid, S., & Hadji, K. (2019). Model Komunikasi Politik Anggota DPRD Dalam Upaya Penguasaan Civic Skills Masyarakat. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 3(1), 1–14.
- Nimmo, D. (2014). *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media*. PT. Remaja Karya.
- Saeni, E. (2020). *Pengalaman Komunikasi Politik Dprd Dki Jakarta Terhadap Gubernur Dki Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Studi Fenomenologi 17 Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2014-2019)*. 2, 218–227.